



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SUB UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGENG PURWANTO**
2. Jabatan : **WAKIL KEPALA DINAS**
3. NHK : **186261**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.675.000.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/80 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 370 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 740.000.000
4. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 177.000.000**

1. MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 1990, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOTOR, HONDA HONDA VARIO 125 ISS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
6. MOBIL, NISSAN SERENA HIGHWAY STAR Tahun 2007, HASIL



SENDIRI Rp. 110.000.000

7. MOTOR, HONDA VARIO 125 MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI

Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 11.800.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.926.300.000**III. HUTANG** Rp. 100.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.826.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.